

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Asnawi, M. Natsir. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press. 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. 2005.
- Mahdi, Imam. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Makaraao, Moh. Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009.
- Prinst, Darwan. *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2002.
- Saleh, Imam Anshori. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press. 2014.

Saleh, K Wantjik. *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1977.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali press. 2012.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2012.

Wijayanta, Tata dan Hery Firmansyah. 2011. *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

### **Jurnal dan Lain-Lain**

Aminah, Siti dan Uli Parulian Sihombing. *Memahami Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion) Putusan Uji Materiil UU Penodaan Agama*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2011.

Manan, Bagir. *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia*, Varia Peradilan Majalah Hukum No. 253, Jakarta. 2006.

Mahkamah Agung RI. *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta. 2005.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.